



2024



LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESIR SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 26 Februari 2025
Inspektur



Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi serta rencana kerja yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun semoga membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.

Painan, 20 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 GAMBARAN ORGANISASI.....	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	8
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016- 2021.....	10
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	17
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	17
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	19
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	42
BAB IV PENUTUP.....	
4.1 KESIMPULAN.....	47
4.2 SARAN.....	48
DAFTAR LAMPIRAN.	
PENGHARGAAN YANG DITERIMA	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun yang menjadi tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 adalah : “ **Meningkatnya Keselamatan Transportasi**”.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan.
2. Meningkatnya Konektifitas dan Akseibilitas Antar Wilayah.
Indikator “Rasio Konektifitas”.
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Indikator “ Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah”

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	2024		% capaian
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	A(82)	A(89,95)*	109%
2	Meningkatnya Konektifitas dan Akseibilitas Antar Wilayah	Rasio Konektifitas	Angka	0.53	0.53	100
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	Persen	100	87	87%
Rata-rata Capaian Kinerja						98,66%

*Data : Hasil AKIP 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh alokasi dana APBD sebesar **Rp. 16.016.351.962,-** (*Enam belas milyar enam belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*). Sasaran tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Dari hasil evaluasi dan analisis serapan anggaran **sangat baik** karena keberhasilan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar **Rp. 15.334.923.967,-** (*Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*) atau 95,75%.

Painan, 20 Januari 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mendorong Dinas Perhubungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan BDinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabuapten Pesisir Selatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan . Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 2ndi, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- m. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 GAMBARAN ORGANISASI

1.4.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan.

1.4.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Peraturan ini menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan Dinas pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas perhubungan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
5. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3 Struktur Organisasi

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, Kepegawaian serta sarana dan prasarana. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 sekretariat, 3 bidang yakni:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang lalu lintas kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang lalu lintas, dan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Lalu Lintas
- b) Kepala Seksi Angkutan
- c) Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda

3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang Pengembangan dan Keselamatan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang Pengembangan dan Keselamatan, dan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
- b) Fungsional Lingkungan Perhubungan
- c) Kepala Seksi Keselamatan

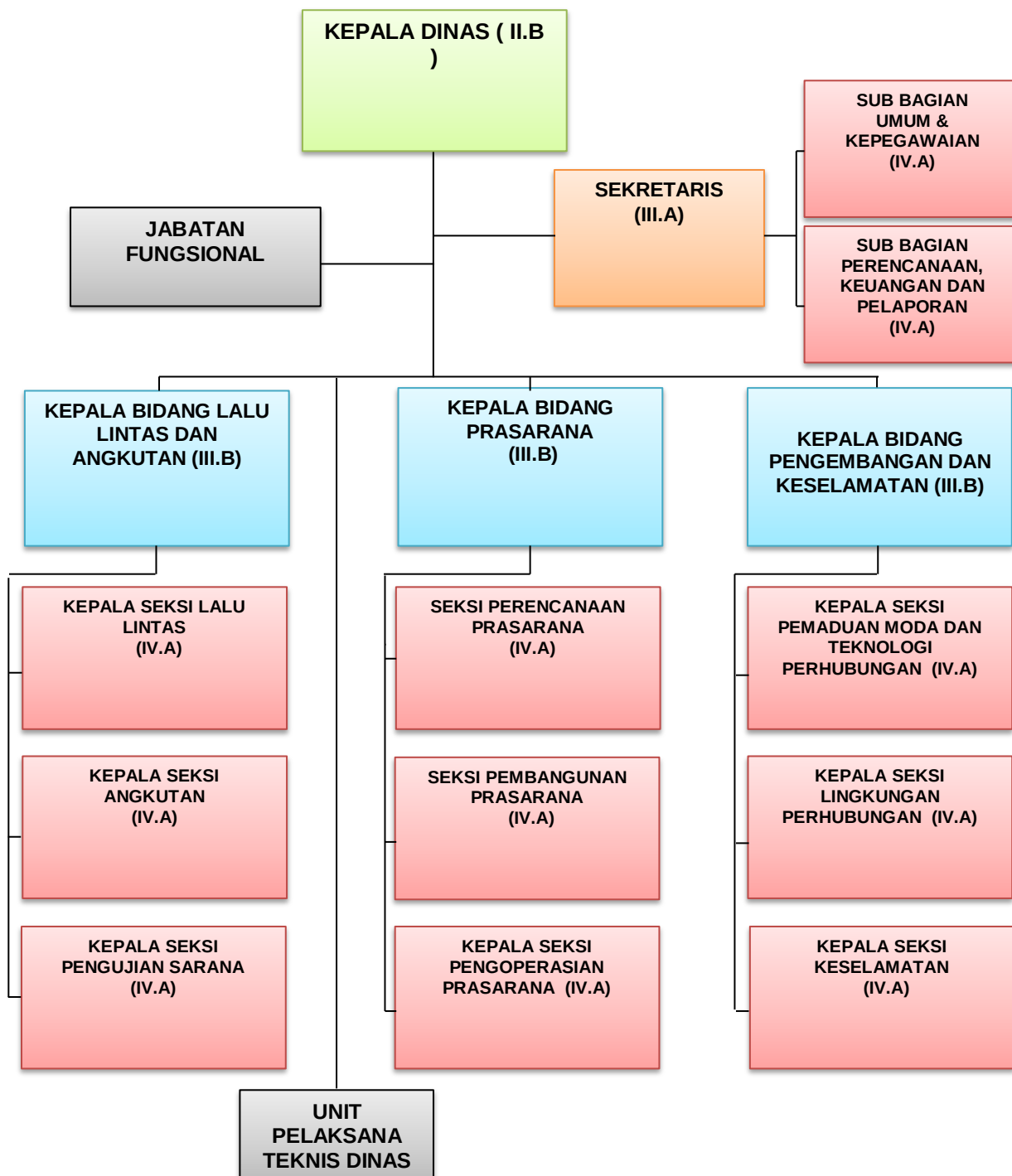
4. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang Prasarana kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang Prasarana, dan dibantu oleh :

- a) Fungsional Perencanaan Prasarana
- b) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
- c) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana

Susunan organisasi tersebut diatas apabila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi akan tampak sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



1.2.4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pessir Selatan kondisi 31 Desember 2024 sebanyak 99 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. 35 orang PNS
- b. 64 orang PTT

Tabel 1.1 Komposisi PNS dan PTT Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2024

N O	GOL	PENDIDIKAN														JUM LAH
		LAKI - LAKI							PEREMPUAN							
		S-2	S-1	D-IV /D.I II	SL TA	SL TP	S D	JUML AH	S-2	S-1	D-IV/ D.I II	SL TA	SL TP	SD	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a	1 2	1					1 3								1 3
Jumlah Gol.IV								4								4
2	III/d III/c III/b III/a		3 8 6 7					3 8 6 7		1 1	1				1 1 1	4 9 7 7
Jumlah Gol.III								24								27
3	II/d II/c II/b II/a		3 1					3 1								3 1
Jumlah Gol II								4								4
4	I/d I/c I/b I/a															
Jumlah Gol I																
Jumlah PTT			10		45			55				9			9	64
JUMLAH																99

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan kondisi 31 Desember 2024 yang ada masih belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga masih dibutuhkan penambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dilaksanakan dengan merangkap tugas oleh pegawai yang ada.

1.2.5. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung tersebut antara lain berupa gedung kantor dan kendaraan dinas. Data kendaraan dinas dan gedung kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 1 dan tabel 3 berikut :

Tabel 1. 2
Sarana Prasarana Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	2	Bidang	497.467.844,-
2	Peralatan dan Mesin	3.022	Unit	10.463.350.749,-
3	Gedung dan Bangunan	43	Unit	3.239.163.996,-
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	191	Buah	24.565.639.815,-
5	Aset lainnya	2	Unit	129.984.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2024

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa aspek strategis yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan tugasnya.

1.5.1 Aspek Strategis Organisasi antara lain :

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Transportasi.
2. Meningkatkan kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi.
3. Memastikan keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi yang handal.
4. Mengembangkan sistem Jaringan Transportasi yang terintegrasi dalam mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.

1.5.2 Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Transportasi.
2. Lebih ditingkatkannya kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi.

3. Memastikan keterjangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi yang handal.
4. Pengembangan sistem Jaringan Transportasi yang terintegrasi dalam mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah.
5. Kurangnya kapasitas dan kualitas SDM Perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang meliputi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021- 2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2024. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam RPJMD selama kurun waktu 2021-2026 secara berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, yang mengandung rumusan tugas, fungsi, sasaran strategis, yang meliputi kebijakan dan program yang realistis, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini akan didukung oleh perencanaan kinerja dan penetapan kinerja setiap tahunnya.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Ketiga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

2.1.2 Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

<i>VISI : “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”</i>			
<i>MISI I : “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”</i>			
<i>MISI III : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Memaksimalkan Sosialisasi dan Penertiban Lalu Lintas 2. Memaksimalkan Sarana dan Prasarana Transportasi
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
		Pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	
		Sosialisasi dan pembinaan lalu lintas dan angkutan	
		Penertiban terhadap alat transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan	

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran keberhasilan suatu target kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Satuan	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai LKJIP	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap AKIP Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	BB(74)	BB(76)	A(81))	A(82)	A(84)	A(86)	Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah		Angka	100	100	100	100	100	100	Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	(IK1 x Bobot Angkutan Jalan)+ (IK2x Bobot Angkutan Sungai danau dan Penyebrangan	Angka	0,52	0,52	0,53	0,53	0,57	0,59	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan

*Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang menjadi komitmen bagi Kepala Daerah untuk mencapainya.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(82)
2	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas	0.53

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai informasi tambahan metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan. Berikut ini skala pengukuran capaian sasaran kinerja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel III.1 Skala pengukuran capaian sasaran kinerja perangkat daerah

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dari 3 Sasaran Strategis ditetapkan 3 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
3. Rasio Konektifitas

Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(82)	*A(89,85)	109 %
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	100	87	87%
3.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektifitas	0.53	0.53	100%
Rata – rata Capaian					96.33 %

* LHE 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sudah bagus. Dari 3 (tiga) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubunhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dengan target A (82). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan adalah A (89,85) atau sebesar 109% dengan predikat **sangat baik**, Nilai AKIP memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
2. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan dengan target 100 Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 87 atau sebesar 87 % dengan predikat **sangat baik**.
3. Rasio Konektifitas dengan target tahun 2024 adalah 0.53 untuk tahun 2024 capaian indikator Rasio Konektifitas adalah 0.53 atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 96.33% dengan predikat **sangat baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Nilai AKIP Dinas Perhubungan	A(81)	*A(89.85)	109%	Sangat Baik

*Data : Hasil AKIP 2023

Dalam pencapaian indikator I dari sasaran strategis telah menampilkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja mencapai 109%. Dari Penilaian terhadap indikator Kinerja Sasaran I yang meliputi Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja yang dapat diinterpretasikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik. Nilai AKIP Tahun 2024 masih menggunakan hasil Penilaian Tahun 2023, karena nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diperoleh dari penilaian terhadap Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perhubungan Tahun 2024.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel III.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2022	2023	2024
Hasil Nilai AKIP Dinas Perhubungan	A(80.82)	A(89.85)	A(89.85)

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
Nilai AKIP Dinas Perhubungan	A(89.85)	*A(86)	109%	Untuk Capaian Nilai AKIP Dinas Perhubungan sudah melebihi dari target pada akhir periode Renstra

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan provinsi dan nasional sebagai berikut :

Tabel III.6 Perbandingan Nilai Sakip Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Dinas Perhubungan Kabupaten Pessel	Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar	Kementerian Perhubungan
Nilai AKIP Dinas Perhubungan	A(89.85)*	B (66.99)**	Tidak ada Perbandingan untuk Nilai AKIP

* Data Capaian LHE 2023

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Dinas Perhubungan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah :

- Masih kurangnya perencanaan disebabkan karena keterbatasan kompetensi personil.
- Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama.
- Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penyusunan anggaran pada setiap tahapan
- Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan adanya kegiatan rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan serta tindak lanjut yang dilakukan atas permasalahan yang ada.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.

1) Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel III. 7 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai AKIP Dinas Perhubungan

NO	Program/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.606.749.823	5.268.620.506	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.657.000	32.483.100	99.47
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.261.569.114	3.938.071.329	92.41
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.463.200	156.421.260	99.97
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.670.540	6.557.500	98.31
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.969.334	29.124.000	97.18
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.037.327	19.595.000	97.79
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.980.000	92.22
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.540.000	1.430.000	92.86
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.660.000	183.438.769	99.88
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.240.000	143.728.671	98.96
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.413.135	543.236.000	99.97
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.690.175	61.260.800	99.30
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.489.998	140.370.077	93.28
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000	7.924.000	99.67
TOTAL		5.606.749.823	5.268.620.506	93.96

Untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja})} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(5.606.749.823 \times 109) - 5.268.620.506}{(5.606.749.823 \times 109)} \times 100 \%$$

Tingkat efisiensi = 99%

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 99% yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari pada penyerapan anggaran di sini menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.3.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel : III.8 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kematangan Inovasi Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Nilai kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	87	87	Sangat Baik

Pada Indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan pada tahun 2024 mendapat nilai 87 dari target yang ditetapkan 100 dan belum mencapai target berdasarkan Surt Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024 Perihal Penyampaian Hasil Pelaporan novsi Daerah Tahun 2024 yang tertuang dalam lampiran Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024 yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Judul Inovasi FLLAJ bentuk inovsi Pelaynan Publik dengan Nilai Kematangn Inovasi 87 (Predikat Tinggi)

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel III.9 Perbandingan Realisasi dengan Capaian Kinerja Indikator Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2022	2023	2024
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan	82	87	87

Pada Indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dalam hal ini tidak ada peningkatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terus berkomitmen dalam meningkatkan inovasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan efisien. Upaya ini membuahkan hasil dengan perolehan nilai capaian inovasi yang membanggakan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) pada tahun 2024.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program dan inovasi yang telah diterapkan, di antaranya:

1. **Digitalisasi Layanan Pengaduan** – Forum LLAJ membuat Aplikasi berbasis Android sehingga segala pengaduan masyarakat berkaitan Lalu Lintas yang macet dapat di Adukan oleh Masyarakat sesegera mungkin. Sistem Aduan Masyarakat – Lalu Lintas (SiAM-LALIN) sudah terdaftar diPlaystore, dengan Aplikasi android yang mempermudah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan mengadukan musibah/kejadian secara online dengan memberikan foto kejadian dimana pelapor sudah registrasi terlebih dahulu ke Aplikasi FLLAJ Pessel. Fitur-fitur Pengaduan Masyarakat sangat mudah, dengan cara masyarakat personal sebagai user / pengguna aplikasi diharuskan mendaftar dulu sebagai pengadu laporan, setelah mendapatkan user dan password, Masyarakat dapat melaporkan secara langsung di lokasi kejadian yang mengakibatkan lalu lintas jalan raya terganggu. Layanan pengaduan akan tampil di website <https://fllaj.pesisirselatankab.go.id/> dan akan segera diproses/ ditindaklanjuti oleh dinas terkait sesuai laporan yang di berikan.
2. **Digitalisasi Peminjaman Rambu-rambu Lalu Lintas** – Menyediakan pinjaman rambu-rambu lalu lintas guna penerapan rekayasa lalu lintas yang berfungsi alat pembagi lajur atau jalur berfungsi untuk mengatur lalu ,intas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jenis rambu-rambu yang dipinjamkan antara lain : *Water Barrier, Traffic Cone, Rambu Pengarah, Rambu*

Stop dan Rambu Verboden. Layanan peminjaman rambu-rambu LALIN dapat diakses pada website <https://filaj.pesisirselatankab.go.id/ Peminjaman>

3. **Peningkatan Infrastruktur dan Keselamatan Jalan** – Implementasi perbaikan infrastruktur, pengembangan fasilitas bagi pejalan kaki, serta pemasangan rambu dan marka jalan yang lebih efektif.
4. **Sinergi dan Partisipasi Masyarakat** – Peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, dinas perhubungan, akademisi, dan komunitas pengguna jalan.
5. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi di sektor lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan mobilitas yang lebih lancar dan berkelanjutan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menegaskan bahwa inovasi akan terus menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

T a b e	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan	87	100	87%	Untuk Capaian Nilai Kematangan Inovasi sampai Akhir Tahun Renstra (Bisa tercapai)

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dibandingkan indikator kinerjanya dengan provinsi dan nasional, karena merupakan target yang ada pada Perangkat Daerah kabupaten Pesisir Selatan..

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Dinas Perhubungan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada indikator kinerja nilai Kematangan Instansi Pemerintah adalah :

1. Fitur untuk pengaduan Masyarakat dalam belum Lengkap dan diperlukan penambahan beberapa ke dalam Aplikasi FLLAJ Pessel
2. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, dinas perhubungan, akademisi, dan komunitas pengguna jalan
3. Diperlukan sinergi dan Partisipasi Masyarakat terhadap penggunaan Aplikasi FLLAJ.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.

1) Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel III. 7 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan

NO	Program/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.606.749.823	5.268.620.506	
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.969.334	29.124.000	97.18
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.037.327	19.595.000	97.79
B	PROG. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	94.051.000	92.806.500	98.68
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	94.051.000	92.806.500	98.68
TOTAL		144.057.661	141.525.500,-	93.96

Untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(144.057.661 \times 87) - 141.525.500,-}{(144.057.661 \times 87)} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat efisiensi} = 98,87 \%$$

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 98,87% yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari pada penyerapan anggaran di sini menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

g. Analisis Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sub Kegiatan :

1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

3.3.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Sasaran Strategis 3 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021- 2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur” dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas.

a. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel III.11 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Indikator Kinerja Rasio Konektivitas tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Rasio Konektivitas	0,53	0,53	100	Sangat Baik

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas.

Rasio Konektivitas merupakan persentase wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat. Berikut Perhitungannya :

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

1. Rumus Perhitungan :

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

1. IK1 (Angkutan Jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut);
2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = $(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut} \times \text{bobot lintas})$ dibagi $(\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut})$
3. Bobot Trayek atau Lintas :
 - a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi ($>5x$ dalam seminggu), bobot = 1;
 - b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8;
 - c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah ($<3x$ dalam seminggu), bobot = 0,5

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

2. Perhitungan Rasio Konektivitas kabupaten/Kota :

Rasio konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$.

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

- a. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK1 = $(29 \times 1) / 55 = 0,53$

- b. Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK2 = $(0 \times 0) / 0 = 0$

Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan :

$(IK1 \ 0,53 \times 100) + (IK2 \ 0 \times 0) = 53 + 0 = 53$

3. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Trayek

No	Layanan	Total Trayek	Rata2 Bobot Trayek	Keterangan
1.	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota	29	1	
	b. Antar Kota Antar Kabupaten	0	0	
	Jumlah	29	1	
2.	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota	55	1	
	b. Antar Kota Antar Kabupaten	0	0	
	Jumlah	55	1	

4. Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Lintas

No	Layanan	Total Trayek	Rata2 Bobot Trayek	Keterangan
1.	Jumlah Lintas Terlayani	0	0	
2.	Jumlah Kebutuhan Lintas	0	0	
	Jumlah	0	0	

5. Data Pelayanan Kebutuhan Trayek

No	KODE TRAYEK	RUTE	LAYANAN
I	TR.1	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	
1	TR.1.01	Pasar Tarusan - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
2	TR.1.02	Pasar Tarusan - Ampang Pulai - Mandeh - Sungai Nyalo - Sungai Pinang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
3	TR.1.03	Pasar Tarusan - Batu Hampar - Duku - Barung barung Belantai - Siguntur	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
4	TR.1.04	Pasar Tarusan - Gurun Panjang - Kapuh	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
II	TR.2	KECAMATAN BAYANG	
5	TR.2.01	Terminal Pasar Baru - Luhung - Sago	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
6	TR.2.02	Terminal Pasar Baru - Talaok - Koto Berapak - Asam Kumbang - Muara Air - Pancung Taba	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
7	TR.2.03	Terminal Pasar Baru - Tanah Keras - Gurun Panjang - Teluk Bakung	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
III	TR.3	KECAMATAN IV JURAI	
8	TR.3.01	Painan - Salido - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
9	TR.3.02	Salido Kecil - Bungo Pasang - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
10	TR.3.03	Limau Gadang Lumpo - Batu Kunit Lumpo - Laban - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
11	TR.3.04	Terminal Pasar Baru - Sago - Sungai Nipah - Taluk Batung - Pasar Batang Kapas	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
12	TR.3.05	Pasar Lumpo - Gunung Bungkok Lumpo - Sungai Gayo Lumpo - Sungai Sarik Lumpo - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
IV	TR.4	KECAMATAN BATANG KAPAS	
13	TR.4.01	Pasar Batang Kapas - Lubuk Nyiur - Teratak Tampatih	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota

14	TR.4.02	Pasar Batang Kapas - Sungai Nyalo - Tuik	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
15	TR.4.03	Pasar Batang Kapas - Anakan - Teluk Kasai - Sungai Bungin	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
16	TR.4.04	Pasar Batang Kapas - Sungai Pampan - Taluk - Taratak - Surantih	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
17	TR.4.05	Pasar Batang Kapas - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
V	TR.5	KECAMATAN SUTERA	
18	TR.5.01	Pasar Surantih - Timbulun - Koto Berapak - Ampalu - Langgai	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
19	TR.5.02	Pasar Surantih - Amping Parak - Tanjung Gadang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota

20	TR.5.03	Pasar Surantih - Amping Parak - Pasir Putih - Pasar Kambang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
21	TR.5.04	Pasar Surantih - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
VI	TR.6	KECAMATAN LENGAYANG	
22	TR.6.01	Pasar Kambang - Koto Baru - Limau Kulam - Kampung Akat	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
23	TR.6.02	Pasar Kambang - Kapau - Koto Kandis - Koto Pulau	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
24	TR.6.03	Pasar Kambang - Padang Harapan - Lubuk Sarik	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
25	TR.6.04	Pasar Kambang - Ganting - Tampunik	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
26	TR.6.05	Pasar Kambang - Lakitan - Air Kalam	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
27	TR.6.06	Pasar Kambang - Lakitan - Padang Laban - Labuhan - Pasar Balai Selasa	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
28	TR.6.07	Pasar Kambang - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
VII	TR.7	KECAMATAN RANAH PESISIR	
29	TR.7.01	Pasar Balai Selasa - Labuhan Sungai Liku	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
30	TR.7.02	Pasar Balai Selasa - Lubuk Cubadak - Pelangai Kaciak	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
31	TR.7.03	Pasar Balai Selasa - Simpang Tiga Paleh - Sumedang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota

32	TR.7.04	Pasar Balai Selasa - Sungai Tunu - Punggasan - Pasar Air Haji	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
33	TR.7.05	Pasar Balai Selasa - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
VII I	TR.8	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	
34	TR.8.01	Pasar Air Haji - Pungasan - Sungai Tunu	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
35	TR.8.02	Pasar Air Haji - Lubuk Buaya - Pasar Punggasan	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
36	TR.8.03	Pasar Air Haji - Air Haji Tengah - Rantau Simalenang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
37	TR.8.04	Pasar Air Haji - Labuhan Tanjak - Muara Gadang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
38	TR.8.05	Pasar Air Haji - Pungasan - Muara Kandis	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
39	TR.8.06	Pasar Air Haji - Pasar Bukit - Sungai Sirah - Pasar Ilalang Panjang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
40	TR.8.07	Pasar Air Haji - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
IX	TR.9	KECAMATAN PANCUNG SOAL	
41	TR.9.01	Pasar Indrapura - Muaro Sakai - Pasar Trans Muara Sakai	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
42	TR.9.02	Pasar Indrapura - Simpang Tiga Pasar Minggu - Loukpon - Damar Rumput - Pasar Lalang Panjang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota

43	TR.9.03	Pasar Indrapura - Kantor Camat Air Pura - Damar Rumput - Pasar Ilalang Panjang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
44	TR.9.04	Pasar Indrapura - Sungai Gemuruh - Sungai Kuyung - Tapan	
45	TR.9.05	Pasar Indrapura - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
X	TR.10	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	
46	TR.10.1	Pasar Tapan - Panadah - Cangki Ayam - Sako	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
47	TR.10.2	Pasar Tapan - Kumbung - Lunang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
48	TR.10.3	Pasar Tapan - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota

XI	TR.11	KECAMATAN LUNANG	
49	TR.11.0 1	Simpang Tiga SMP Lunang - Lunang Barat - Lunang II - Lunang III	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
50	TR.11.0 2	Simpang Tiga SMP Lunang - Lunang I - Tanjung Beringin - Sindang - Pasar Silaut/Terminal Silaut	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
XII	TR.12	KECAMATAN SILAUT	
51	TR.12.0 1	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Tapan - Indrapura - Air Haji - Balai Selasa - Kambang - Surantih - Batang Kapas - Painan - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
52	TR.12.0 2	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai Sarik - Pasir Binjai - Durian Seribu - Pusat KTM - Sambungo	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
53	TR.12.0 3	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai Pulai - Air Hitam	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
54	TR.12.0 4	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai Serik - Pasir Binjai - Talang Binjai	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota
55	TR.12.0 5	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai sarik - Pasir Binjai - Sungai Pulai - Lunang III	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota

RINCIAN DATA TRAYEK YANG DILAYANI

No.	KODE TRAYEK	RUTE	LAYANAN	FREKUENSI	KETERANGAN	Bobot
I	TR.1	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN				
1	TR.1.01	Pasar Tarusan - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
2	TR.1.03	Pasar Tarusan - Batu Hampar - Duku - Barung barung Belantai - Siguntur	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
II	TR.2	KECAMATAN BAYANG				
3	TR.2.02	Terminal Pasar Baru - Talaok - Koto Berapak - Asam Kumbang - Muara Air - Pancung Taba	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
III	TR.3	KECAMATAN IV JURAI				
4	TR.3.01	Painan - Salido - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
IV	TR.4	KECAMATAN BATANG KAPAS				
5	TR.4.01	Pasar Batang Kapas - Lubuk Nyiur - Teratak Tampatih	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
6	TR.4.04	Pasar Batang Kapas - Sungai Pampan - Taluk - Taratak - Surantih	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
V	TR.5	KECAMATAN SUTERA				
7	TR.5.01	Pasar Surantih - Timbulun - Koto Berapak - Ampalu - Langgai	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
8	TR.5.02	Pasar Surantih - Amping Parak - Tanjung Gadang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1

9	TR.5.03	Pasar Surantih - Amping Parak - Pasir Putih - Pasar Kambang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
VI	TR.6	KECAMATAN LENGAYANG				
10	TR.6.01	Pasar Kambang - Koto Baru - Limau Kulam - Kampung Akat	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
11	TR.6.02	Pasar Kambang - Kapau - Koto Kandis - Koto Pulai	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
12	TR.6.04	Pasar Kambang - Ganting - Tampunik	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
13	TR.6.05	Pasar Kambang - Lakitan - Air Kalam	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
VII	TR.7	KECAMATAN RANAH PESISIR				
14	TR.7.01	Pasar Balai Selasa - Labuhan Sungai Liku	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
15	TR.7.02	Pasar Balai Selasa - Lubuk Cubadak - Pelangai Kaciak	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
16	TR.7.03	Pasar Balai Selasa - Simpang Tiga Paleh - Sumedang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
VIII	TR.8	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI				
17	TR.8.01	Pasar Air Haji - Pungasan - Sungai Tunu	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1

18	TR.8.03	Pasar Air Haji - Air Haji Tengah - Rantau Simalenang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
19	TR.8.06	Pasar Air Haji - Pasar Bukit - Sungai Sirah - Pasar Ilalang Panjang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
IX	TR.9	KECAMATAN PANCUNG SOAL				
20	TR.9.01	Pasar Indrapura - Muaro Sakai - Pasar Trans Muara Sakai	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1

21	TR.9.02	Pasar Indrapura - Simpang Tiga Pasar Minggu - Loukpon - Damar Rumpit - Pasar Lalang Panjang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
22	TR.9.03	Pasar Indrapura - Kantor Camat Air Pura - Damar Rumpit - Pasar Ilalang Panjang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
23	TR.9.05	Pasar Indrapura - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
X	TR.10	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN				
24	TR.10.1	Pasar Tapan - Panadah - Cangki Ayam - Sako	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
25	TR.10.2	Pasar Tapan - Kumbung - Lunang	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
26	TR.10.3	Pasar Tapan - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
XI	TR.11	KECAMATAN LUNANG				
27	TR.11.01	Simpang Tiga SMP Lunang - Lunang Barat - Lunang II - Lunang III	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
XII	TR.12	KECAMATAN SILAUT				
28	TR.12.01	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Tapan - Indrapura - Air Haji - Balai Selasa - Kambang - Surantih - Batang Kapas - Painan - Sago - Terminal Pasar Baru	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1
29	TR.12.05	Pasar Silaut/Terminal Silaut - Sungai sarik - Pasir Binjai - Sungai Pulai - Lunang III	Angkutan Kota Dalam Kabupaten/Kota	>5X Seminggu	Tinggi	1

RINCIAN DATA KEBUTUHAN LINTAS

No.	LINTASAN	JALUR	FREKUENSI	KETERANGAN
		NIHIL		

RINCIAN DATA LINTAS YANG DILAYANI

No.	LINTASAN	JALUR	FREKUENSI	KETERANGAN
		NIHIL		

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi dengan Capaian Kinerja Indikator Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Konektivitas	0.53	0.53	100%	0.53	0.53	100%

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel III.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

C	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
	Rasio Konektivitas 2	0.53	0.59	100%	Untuk Capaian Rasio Konektivitas sampai Akhir Tahun Renstra (Bisa tercapai)

D

d.Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dibandingkan indikator kinerjanya dengan provinsi dan nasional, karena tidak ada kecocokan dan persamaan Indikator.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Dinas Perhubungan

Adapun permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran pengguna jalan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan di jalan.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu.
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk penyelenggaraan operasional yang lebih baik.
4. Masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, Zoss, pagar pengaman jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang.
5. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena kurangnya perawatan.
6. Belum disiplinnya para pemilik dan pengguna kendaraan saat memarkirkan

- kendaraan di badan dan bahu jalan serta sering melanggar larangan.
7. Belum disiplinnya para pedagang dalam menjajakan dagangan mereka hingga ke badan jalan terutama di pasar pasar tingkat Kecamatan.
 8. Kondisi jalan yang rusak juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Strategi/upaya ke depan yang dapat ditempuh dalam meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas.
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
 - Penyuluhan langsung.
 - Pemasangan spanduk keselamatan berlalu lintas, poster, stiker.
 - Menginformasikan melalui website.
3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Pesisir Selatan.
4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, Zoss, guardraill) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU).
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

1) Sumber Daya Anggaran

Berikut ini analisis kebutuhan sumber daya Anggaran dari sub kegiatan yang mendukung indikator Rasio Konektivitas

Tabel III. 13 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan

B	PROG. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.369.152.139	10.025.986.761	
1.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.625.000	55.410.200	99.61

2.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	23.28.1000	23.258.450	99.90
3.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	199.994.348	199.634.200	99.82
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	9.651.357.301	9.314.882.532	96.51
5.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.271.5000	100..299.900	97.65
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan dan Pembangunan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	42.725.000	42.725.000	100.0 0
7.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.371.040	45.000.000	99.18
8.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.969.950	82.969.200	100.0 0
9.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	42.990.000	42.984.250	99.99
10.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	94.051.000	92.806.500	98.68
11.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota	26.072.500	26.016.529	99.79
C	PROG. PENGELOLAAN PELAYARAN	40.450.000	40.316.700	
12.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40.450.000	40.316.700	99.67
	JUMLAH	10.414.152.139	10.066.303.461	

Untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No.214/PMK.02/2017, sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(10.414.152.139 \times 0,53) - 10.066.303.461}{(10.414.152.139 \times 0,53)} \times 100 \%$$

Tingkat efisiensi = 82 %

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator

kinerja Rasio Konektivitas dengan tingkat efisiensi yaitu sebesar 82% yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari pada penyerapan anggaran di sini menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan sudah optimal untuk mencapai sasaran.

g. Analisis Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. PROG. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Sub Kegiatan :

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan dan Pembangunan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota

2. PROG. PENGELOLAAN PELAYARAN

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan

Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp. 141.525.500,- dari total pagu sebesar Rp. 144.057.661,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1.7%.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Tabel III.14 Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 berdasarkan Program

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran TA 2024	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.606.749.823,-	Rp 5.268.620.506,-	93.97%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 10.369.152.139,-	Rp 10.025.986.761,-	96.69%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 40.450.000,-	Rp 40.316.700,-	99.67%
	TOTAL	Rp 16.016.351.962,-	Rp 15.334.923.967,-	95.75%

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.606.749.823	5.268.620.506	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.657.000	32.483.100	99.47
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.261.569.114	3.938.071.329	92.41
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.463.200	156.421.260	99.97
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.670.540	6.557.500	98.31
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.969.334	29.124.000	97.18
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.037.327	19.595.000	97.79
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.980.000	92.22
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.540.000	1.430.000	92.86
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.660.000	183.438.769	99.88
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.240.000	143.728.671	98.96

11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.413.135	543.236.000	99.97
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.690.175	61.260.800	99.30
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.489.998	140.370.077	93.28
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000	7.924.000	99.67
B	PROG. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.369.152.139	10.025.986.761	
16.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.625.000	55.410.200	99.61
17.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	23.28.1000	23.258.450	99.90
18.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	199.994.348	199.634.200	99.82
19.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	9.651.357.301	9.314.882.532	96.51
20.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.271.5000	100.299.900	97.65
21.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan dan Pembangunan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	42.725.000	42.725.000	100.00
22.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.371.040	45.000.000	99.18
23.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.969.950	82.969.200	100.00
24.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	42.990.000	42.984.250	99.99
25.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	94.051.000	92.806.500	98.68
26.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota	26.072.500	26.016.529	99.79

C	PROG. PENGELOLAAN PELAYARAN	40.450.000	40.316.700	
27.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40.450.000	40.316.700	99.67
	JUMLAH	16.016.351.962	15.334.923.967	

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan realisasinya diatas 90%, Sementara kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan kinerja Dinas Perhubungan, untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Berikut ini dapat dilihat beberapa dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja:

- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor



- Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan



- Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 96.33% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 98.85% yaitu pada sasaran I Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dengan target A (89.85%). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan adalah A (89.85%) dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2023 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan dengan target 100. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan adalah 87 atau sebesar 87% dengan predikat **sangat baik**.
- c. Nilai Rasio Konektivitas dengan target 0.53 Capaian indikator Nilai Rasio Konektivitas Perhubungan Tahun 2024 adalah 0.53 atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 96.33% dengan predikat **sangat baik**.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar

Rp.16.016.351.962,- dan terealisasi sebesar Rp.15.334.923.967 atau sebesar 95.75%.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang adalah:

- a. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pada satuan kerja dan mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik, melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk, melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan melakukan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan, memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional/lapangan mengenai ketugasan di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
- d. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
- e. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas.

Perjanjian Kinerja Perubahan Esselon II



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRIJONI, SH.M.SI
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

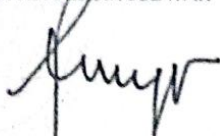
SYAFRIJONI, SH.M.SI
NIP. 19680906 199308 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	0,53
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.606.749.823	-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 10.369.152.139	-
3	Program Pelayaran	Rp. 40.450.000	-
JUMLAH		Rp. 16.016.351.962	-

BUPATI PESISIR SELATAN



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Painan, 15 Oktober 2024
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAFRI/ONI, SH.M.SI
 Nip. 19680906 199308 1 001

Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2024

- Nama Penghargaan : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2024.
- Pemberi Penghargaan : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
- Penerima Penghargaan : Bupati Pesisir Selatan



Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2024

Nama Penghargaan : HUB Award Kabupaten Terbaik Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Terbaik Nominasi Inovasi Antar Moda Transportasi Kategori Kabupaten Besar

Pemberi Penghargaan : Menteri Perhubungan

Penerima Penghargaan : Bupati Pesisir Selatan

